



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| BAB. I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 2 |
| C. Dasar Hukum | 2 |
| D. Struktur Organisasi | 4 |
| E. Sistematika Penyusunan LKjIP | 6 |
| | |
| BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis | 9 |
| 1. Visi dan Misi | 9 |
| 2. Tujuan dan Sasaran | 9 |
| 3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran | 10 |
| B. Rencana Kinerja Tahunan | 17 |
| C. Rencana Aksi | 24 |
| D. Perjanjian Kinerja Anggaran Tahun 2021 | 26 |
| E. Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan Tahun 2021 | 26 |
| | |
| BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja | 27 |
| B. Analisis Capaian Kinerja | 48 |
| C. Realisasi Anggaran | 52 |
| | |
| BAB. IV PENUTUP | |
| Penutup | 59 |

DAFTAR LAMPIRAN :

- I. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021
- II. Cascading
- III. Pohon Kinerja
- IV. Rencana Aksi Tahun 2021
- V. Peta Proses Bisnis Tahun 2021 dan 2022
- VI. Penilaian Pelayanan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), yang disusun sesuai instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/16/18/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah. Pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi organisasi, adapun visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis perubahan SKPD Tahun 2021-2026 mengacu pada Visi Bupati Tanjung Jabung Timur yaitu "MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)".

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 ini disampaikan semoga dapat memberikan kontribusi positif pada laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada umumnya.

Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Muara Sabak, Januari 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



SYAFARUDDIN, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671015 198810



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu rangkaian pertanggungjawaban yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsure penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu rencana strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi.

Sejalan dengan maksud diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan



dan anggota DPRD juga kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada padanya. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada pimpinan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan, laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Tahun 2021 mencakup hal – hal sebagai berikut :

1. **Aspek akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/ sasaran strategik telah dicapai pada Tahun 2021.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Bagian Organisasi bagi upaya perbaikan kinerja dimasa datang. untuk setiap celah kinerja yang ditemukan akan **dirumuskan** strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditinggalkan secara berkelanjutan.

C. DASAR HUKUM

1. Idiil : Pancasila
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;



- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- j. Peraturan Daerah Nomor 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021;
- l. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021;



- m. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- n. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- o. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan adanya momentum otonomi daerah serta semangat reformasi, yang secara tidak langsung membawa pengaruh dalam penataan pemerintah pada umumnya dan penataan organisasi perangkat daerah, kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan sumber daya aparatur yang penjabarannya dituangkan kedalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Atas dasar hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat, adapun susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas :

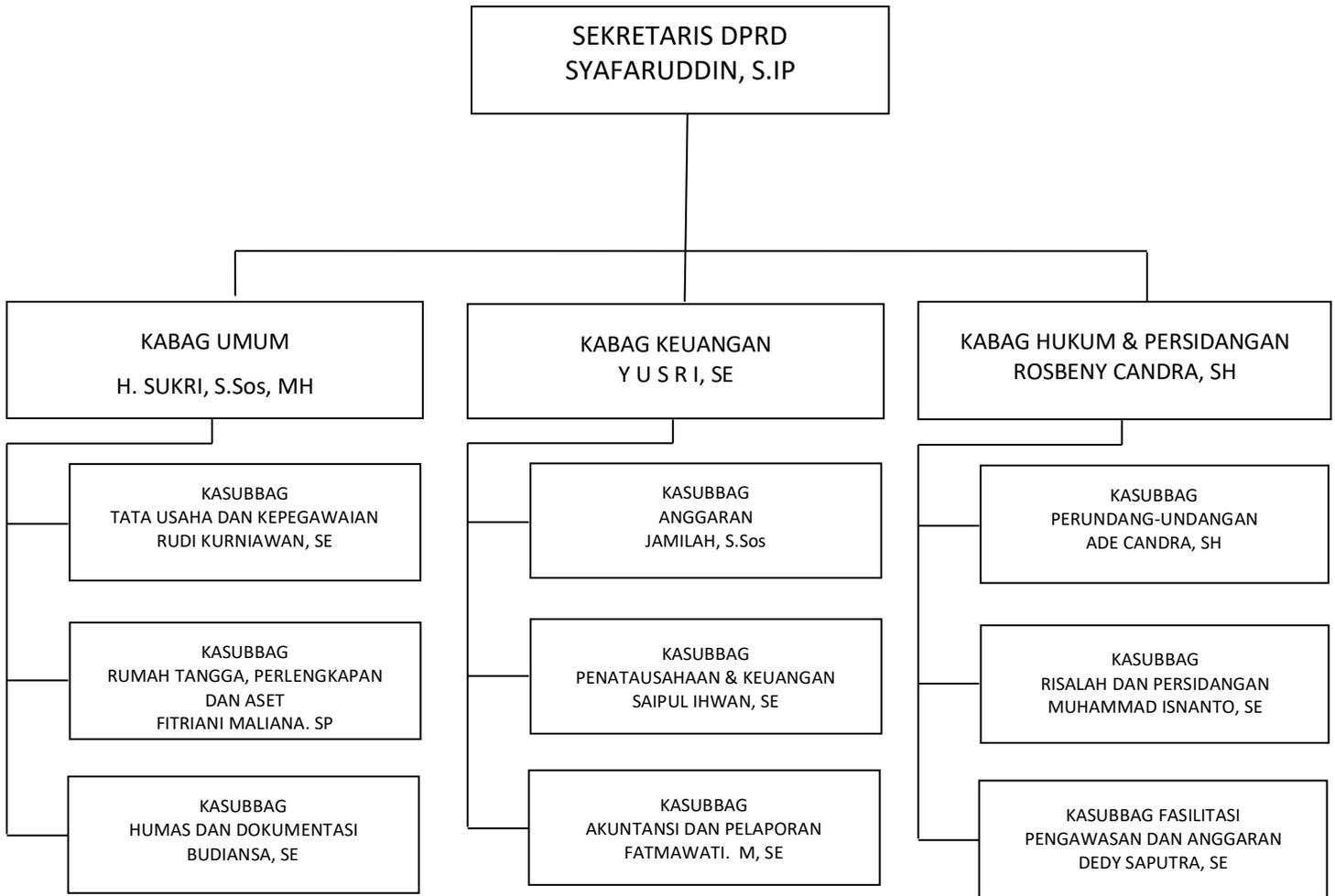


- 1) Sekretaris DPRD
- 2) Bagian - bagian terdiri atas :
 1. Bagian Umum, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Aset
 - 3) Sub Bagian Humas dan Dokumentasi
 2. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Anggaran
 - 2) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan
 - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
 3. Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan
 - 2) Sub Bagian Risalah dan Persidangan
 - 3) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Anggaran



Sedangkan Bagian Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dalam bagan berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014.



Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian tahun yang bersangkutan

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Rencana Aksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021, yang didalamnya terdapat sasaran, indikator, penanggungjawab dan besarnya anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2021.

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam kolom dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



b. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021
2. Cascading
3. Pohon Kinerja
4. Rencana Aksi
5. Peta Proses Bisnis Tahun 2021 dan 2022
6. Penilaian Pelayanan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”.

Misi Sekretariat DPRD mengacu pada Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021–2026 yaitu misi ke-4 “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis”.

2. TUJUAN & SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan pada umumnya setelah penetapan Visi dan Misi dan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

1. Meningkatkan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung DPRD dalam menjalankan fungsinya
2. Meningkatkan Pelayanan Publik dan budaya kerja aparatur

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek.



Adapun sasaran Sekretariat DPRD :

1. Peningkatan peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan
2. Peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan

3. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Tercapainya tujuan dan sasaran memerlukan suatu cara yang disebut strategik yang merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pemebangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaan melalui APBN / APBD maupun dalam kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program pemerintah, serta kinerja.

Sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2021-2026, ikhtisar sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut :



| SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|--|--|--|---|
| 1. Peningkatan peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan 2. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN 5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | 3. Administrasi Barang Milik Daerah | 8. Pengamanan Barang Milik Daerah |



| | | pada Perangkat Daerah | SKPD |
|--|--|--|--|
| | | 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | | 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16. Fasilitas Kunjungan Tamu 17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 18. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |



| | | | |
|--|---|---|--|
| | | 9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 27. Penyelenggaraan Adm. Keuangan DPRD 28. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 29. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD |
| | | 10. Layanan Administrasi DPRD | 30. Penyelenggaraan Adm. Keuangan DPRD 31. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 32. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD |
| | 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 11. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 33. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 34. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 35. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan 36. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau |



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | Naskah Akademik |
| | | 12. Pembahasan Kebijakan Anggaran | 37. Pembahasan KUA dan PPAS 38. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 39. Pembahasan APBD 40. Pembahasan APBD Perubahan 41. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD |
| | | 13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 42. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 43. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 44. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 45. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 46. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lap. Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |
| | | 14. Peningkatan Kapasitas DPRD | 47. Bimbingan Teknis DPRD 48. Publikasi dan Dokumentasi Dewan |



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | 49. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 50. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 51. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 52. Penyusunan Program Kerja DPRD |
| | | 15. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 53. Kunjungan Kerja Dalam Daerah 54. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD 55. Pelaksanaan Reses |
| | | 16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 56. Penyusunan Kode Etik DPRD 57. Pengawasan Kode Etik DPRD |
| | | 17. Pembahasan Kerja Sama Daerah | 58. Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah |
| | | 18. Fasilitasi Tugas DPRD | 59. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 60. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD |



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun kinerja tahunan yang disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan | Target | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Meningkatnya Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung DPRD dalam menjalankan fungsinya 2. Meningkatnya Pelayanan Publik, dan budaya kerja aparatur | 1. Peningkatan peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | 3 dokumen |
| | 2. Peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 dokumen | 8 dokumen |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1 tahun |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 16 dokumen |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 dokumen |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah (SKPD) | 2 jenis |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | 141 stel |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | 31 orang |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 28 jenis |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1 tahun |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | 8 jenis |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 9 jenis |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | 12 bulan |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 bulan |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 bulan |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | |
| | Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 4 unit | 1 unit |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 8 unit | 2 unit |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2500 surat |
| | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 11 bulan |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 28 unit |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya | 5 jenis |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | | | |
|--|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis |
| | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | |
| | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | 14 kali | 14 kali | 14 kali | 14 kali | 14 kali | 14 kali |
| | Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD | 120 stel | 90 stel |
| | Pelaksanaan medical check up DPRD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Layanan Administrasi DPRD | | | | | | |
| | Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD | 40 | 30 | 18 | 25 | 30 | 25 |
| | Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali |
| | Perogram Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | | | | | | |
| | Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD | | | | | | |
| | Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah | 1 Perda | 1 Perda | 1 Perda | 1 Perda | 1 Perda | 1 Perda |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Pembahasan rancangan peraturan daerah | 4 Perda |
| | Penyelenggaraan kajian perundang-undangan | 2 rancangan |
| | Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik | 1 dokumen |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | 1 dokumen |
| | Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS | 1 dokumen |
| | Pembahasan APBD | 2 dokumen |
| | Pembahasan APBD perubahan | 1 dokumen |
| | Pembahasan pertanggung jawaban APBD | 2 dokumen |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | |
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum | 24 kali |
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur | 12 kali |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | 24 kali |
| | Pengawasan urusan pemerintahn bidang perekonomian | 12 kali |
| | Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan | 6 kali |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | |
| | Bimbingan teknis DPRD | 90 orang |
| | Publikasi dan dokumentasi dewan | 48 kali |
| | Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli | 3 kali |
| | Penyediaan tenaga ahli fraksi | 5 orang |
| | Penyelenggaraan hubungan masyarakat | 6 kali | 3 kali |
| | Penyusunan Program kerja DPRD | 1 dokumen |
| | Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | | |
| | Kunjungan kerja dalam daerah | 24 kali |
| | Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD | 400 pokir |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Pelaksanaan Reses | 3 kali |
| | Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | |
| | Penyusunan kode etik DPRD | 1 dokumen |
| | Pengawasan kode etik DPRD | 2 kali |
| | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | | | |
| | Fasilitasi verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah | 4 kali |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | | |
| | Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD | 6 kali |
| | Penyusunan laporan kerja DPRD | 1 dokumen |



C. RENCANA AKSI

Rencana aksi Sekretariat DPRD tertuang pada table di bawah ini :

**RENCANA AKSI
SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET | AKSI/ KEGIATAN | JADWAL KEGIATAN | | | | TARGET OUTPUT/ KELUARAN | PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | | | |
|-------------------|---|--|----------------|--|-----|-----|-----|-------------------------|------------------|------------------------------|--|---|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | | | | | | | | | |
| 1 2 | Peningkatan Peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan Peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan | Persentase fasilitasi penyusunan Perda | 90% | Melaksanakan Pembahasan rancangan Peraturan Daerah | | | | | 1 perda | Bagian Hukum dan Persidangan | Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase penyelesaian Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 1.292.133.013 | | |
| | | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 78 | Melaksanakan Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | 7 dokumen | | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran | | 410.717.797 | |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) | 72 | Melaksanakan Kunker dalam Daerah | | | | | 78 kali | | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | 780.225.000 |
| | | Laporan Keuangan Sesuai (SAP) | Sesuai | Melaksanakan Bimbingan Teknis | | | | | 90 orang | | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD | | | |



D. PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2021

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | | Program | Anggaran (Rp) |
|---|--|--------|---|---|-------------------|
| Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Dewan | Indeks Kepuasan Dewan Terhadap Kesekretariatan | 79 | 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 32.420.577.872,00 |
| | Indeks Kepuasan Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Kesekretariatan | 79 | 2 | Administrasi keuangan perangkat daerah | 7.210.247.516,00 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesekretariatan | 79 | | | |

Jumlah Anggaran : Rp. 39.630.825.388,00

Jumlah Program : 2

E. PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2021

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|---|--|--------|---|---|-------------------|
| 1. Peningkatan Peran DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan | Persentase Fasilitasi Penyusunan Perda | 90% | 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 30.395.975.560,00 |
| 2. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 78 | 2 | Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 7.210.142.458,00 |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) | 72 | | | |
| | Laporan Keuangan Sesuai (SAP) | Sesuai | | | |

Jumlah Anggaran : Rp. 37.606.118.018,-

Jumlah Program : 2



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk petanggungjawaban kinerja Sekretaris DPRD dalam tahun 2021 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Sekretaris DPRD dari aspek keuangan, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan yaitu perbandingan antara realisasi dan targetnya. Hasil pengukuran pencapaian kinerja disajikan menurut kelompok indikator kinerja utama dan capaian sasaran secara keseluruhan terhadap indikator utama dengan mencakup sasaran diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran dapat dicapai dengan sangat baik, keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen dari masing-masing Bagian pada Sekretariat DPRD.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran Kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor



14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengolahan data Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Sekretariat DPRD dengan menggunakan metode Survei. Survei Periodek adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik/Sekretariat DPRD terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat, survei ini dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Tabel 3.1
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

| Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interbal Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan (x) | Kinerja Unit Pelayanan (y) |
|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 1,00 - 2,5966 | 25,00 -64,99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 2,60 -3,064 | 65,00 - 76,70 | C | Kurang Baik |
| 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 - 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 -4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat Baik |

Berdasarkan tabel 3.1 nilai interval pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur pada nilai persepsi 3 dengan nilai interval 3,0644 - 3,532 dengan nilai interbal konversi (NIK) 76,61-88,30 sehingga mutu pelayanannya B terdapat kinerja Sekretariat DPRD pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan pelayanan BAIK.

Nilai akuntabilitas Kinerja (AKIP) Sekretariat DPRD diperoleh dari OPD terkait yaitu Inspektoran Daerah dan Nilai Laporan Keuangan Sesuai (SAP) diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 disajikan pada tabel 3.2



Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|---------------|
| 1. Peningkatan Peran DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan | Persentase Fasilitasi Penyusunan Perda | 90% |
| 2. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 78 |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) | 72 |
| | Laporan Keuangan Sesuai (SAP) | Sesuai |

| PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | % | KET |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 30.395.975.560 | 28.498.149.226 | 93,76 | APBDP |
| 2 Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Rp 7.210.142.458 | 4.348.877.396 | 60,32 | APBDP |
| | Rp 37.606.118.018 | 32.847.026.622 | 87,34 | |



Capaian rencana aksi Sekretariat DPRD Tahun 2021

**Tabel 3.3
Capaian Rencana Aksi Tahun 2021**

| INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp) | JADWAL KEGIATAN | | | | REALISASI | | | | | | | | JUMLAH | | | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|--|--------------|--|-----------------|---|---|------|-------------|-------------|------|-------------|----|-------------|----|-------------|--------|---------------|----|---|---|
| | SASARAN | | | | | | | | | | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | TR 1 | | TR 2 | | TR 3 | | TR 4 | | A | K |
| | | | | | | | | | | | | | | | A | K | A | K | A | K | A | K | | |
| 1 | Persentase fasilitasi Penyusunan Perda | 90% | 90% | Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | 7.210.142.458 | | | | | 770.049.232 | | | | | | | | | 4.348.877.396 | | | |
| | | | | | 1. Persentase penyelesaian peraturan daerah dan peraturan DPRD | 1 perda | Melaksanakan Pembahasan Peraturan Daerah | 1.292.133.013 | - | v | - | v | 13.522.250 | 0 | 72.105.700 | 0 | 264.030.300 | 0 | 340.698.464 | 1 | 690.356.714 | 1 | | |
| 2 | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 78 | 78,65 | | 2. Persentase pembahasan kebijakan anggaran | 7 dokumen | Melaksanakan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 410.717.797 | | v | v | v | 0 | 0 | 58.522.500 | 1 | 89.664.600 | 2 | 84.017.400 | 2 | 232.204.500 | 5 | | |
| | | | | | 3. Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintah | 78 kali | Melaksanakan kunker dalam daerah | 780.225.000 | | v | v | v | 0 | 0 | 64.145.000 | 15 | 71.420.000 | 20 | 76.855.000 | 20 | 212.420.000 | 55 | | |
| 3 | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) | 72 | 76,54 | | 4. Persentase peningkatan kapasitas DPRD | 90 orang | Melaksanakan bimbingan teknis | 2.102.965.571 | v | | v | | 350.259.682 | 20 | 163.704.000 | 10 | 125.305.200 | 25 | 670.177.000 | 5 | 1.309.445.882 | 90 | | |
| | | | | | 5. Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintah | 3 kali | Melaksanakan reses 11 kecamatan | 1.002.261.725 | v | v | | v | 138.216.300 | 1 | 11.020.000 | 0 | 195.242.100 | 1 | 244.390.000 | 1 | 588.868.400 | 3 | | |
| 4 | Laporan Keuangan Sesuai (SAP) | Sesuai | Sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Adapun capaian kinerja output Sekretaris DPRD tahun 2020 dan 2021 dituangkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Output Tahun 2020 dan 2021

| Sasaran | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target 2021 | | Realisasi | | | | Capaian | |
|---|--|----------|---|---|----|-----------|----|---------|----|----------|-----|
| | | | | | | 2021 | | 2020 | | 2021 (%) | |
| 1. Peningkatan peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan | I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | INDEKS PELAYANAN INSTANSI | NA | | | | | | | |
| 2. Peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan | 01:01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | 100 | | | | | | | |
| | | 01:01:01 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Laporan Realisasi (Dokumen) | 3 | dokumen | 3 | dokumen | 3 | dokumen | 100 |
| | | 01:01:02 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen) | 9 | dokumen | 9 | dokumen | 9 | dokumen | 100 |
| | 01:02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah | 100 | | | | | | | |
| | | 01:02:01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (kali) | 1 | kali | 1 | kali | 1 | kali | 100 |
| | | 01:02:02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pembayaran jasa administrasi Tugas ASN (Bln) | 12 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 |
| | | 01:02:03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan) | 12 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 |
| | | 01:02:04 | Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen Laporan Akuntansi (Dokumen) | 16 | dokumen | 16 | dokumen | 16 | dokumen | 100 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|------------|---------|-----|---------|----|---------|-----|
| | 01:02:05 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen Laporan Keuangan (Dokumen) | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100 |
| 01:03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | | | | | | |
| | 01:03:01 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jenis Pengamanan Barang Milik Daerah (Jenis) | 2 | jenis | 2 | jenis | 2 | jenis | 100 |
| 01:04 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | | | | | | |
| | 01:04:01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel) | 141 | stel | 141 | stel | 65 | stel | 100 |
| | 01:04:02 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang) | 31 | orang | 29 | orang | 27 | orang | 94 |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah | 100 | | | | | | |
| | 01:05:01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis) | 28 | jenis | 28 | jenis | 28 | jenis | 100 |
| | 01:05:02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Thn) | 1 | tahun | 1 | tahun | 1 | tahun | 100 |
| | 01:05:03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pengadaan peralatan Rumah Tangga(Jenis) | 8 | jenis | 8 | jenis | 4 | jenis | 100 |
| | 01:05:04 | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan (Jenis) | 9 | jenis | 9 | jenis | 5 | jenis | 100 |
| | 01:05:05 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang – Undangan | Pembayaran tagihan surat kabar (Blh) | 12 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 |
| | 01:05:06 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Penyediaan makan minum tamu (Bulan) | 12 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 |
| | 01:05:07 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan) | 12 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 |
| 01:06 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | | | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--|--|------------|--------|------|--------|------|--------|-----|
| | | 01:06:01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (Unit) | 4 | unit | 4 | unit | 2 | unit | 100 |
| | | 01:06:02 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit) | 8 | unit | 8 | unit | 5 | unit | 100 |
| 01:07 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | | | | | | |
| | | 01:07:01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai (Lembar) | 2500 | lembar | 2500 | lembar | 2000 | lembar | 100 |
| | | 01:07:02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bln) | 12 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 |
| | | 01:07:03 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pembayaran Gaji PHTT (Bln) | 11 | bulan | 11 | bulan | 11 | bulan | 100 |
| 01:08 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | | | | | | |
| | | 01:08:01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit) | 28 | unit | 28 | unit | 25 | unit | 100 |
| | | 01:08:02 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin (Jenis) | 5 | jenis | 5 | jenis | 4 | jenis | 100 |
| | | 01:08:03 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung) | 7 | gedung | 7 | gedung | 6 | gedung | 100 |
| | | 01:08:04 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang terpelihara (Gedung) | 4 | gedung | 4 | gedung | 4 | gedung | 100 |
| 1.9 | Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD | | | Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 | | | | | | |
| | | 01:09:01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Pembayaran Gaji DPRD (Bulan) | 14 | bulan | 14 | bulan | 14 | bulan | 100 |
| | | 01:09:02 | Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD | Jumlah Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD (Stel) | 120 | stel | 120 | stel | 43 | stel | 100 |
| | | 01:09:03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Medical Check Up DPRD(kali) | 1 | kali | 0 | kali | 0 | kali | 0 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|--|--------------|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|
| 01:10 Layanan Administrasi DPRD | | | | Persentase Layanan Administrasi DPRD | 100 | | | | | | |
| | | 01:10:01 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Administrasi Keanggotaan DPRD DPRD (Bln) | 12 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 |
| | | 01:10:02 | Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD | Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (kali) | 40 | kali | 40 | kali | 40 | kali | 100 |
| | | 01:10:03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (kali) | 12 | kali | 12 | kali | 12 | kali | 100 |
| 2 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 100 % | | | | | | |
| 02:01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | Persentase Penyelesaian Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100 | | | | | | |
| | | 02:01:01 | Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1 | dokumen | 1 | dokumen | | dokumen | 0 |
| | | 02:01:02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan (Ranperda) | 4 | ranperda | 4 | ranperda | | ranperda | 0 |
| | | 02:01:03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan | Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (Rancangan) | 2 | rancangan | 2 | rancangan | | rancangan | 0 |
| | | 02:01:04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Dan / Atau Naskah Akademik | Jumlah Naskah Akademik (Dokumen) | 1 | dokumen | 1 | dokumen | | dokumen | 0 |
| 02:02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran | 6 | | | | | | |
| | | 02:02:01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Pelaksanaan Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100 |
| | | 02:02:02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS (Dokumen) | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100 |
| | | 02:02:03 | Pembahasan APBD | Jumlah Pelaksanaan Pembahasan APBD (Dokumen) | 2 | dokumen | 2 | dokumen | 2 | dokumen | 100 |
| | | 02:02:04 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen) | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100 |
| | | 02:02:05 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 2 | dokumen | 2 | dokumen | 2 | dokumen | 100 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| 02:03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | 63 | | | | | |
|---|----------|---|---|--|---------|----|---------|----|---------|-----|
| | 02:03:01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Kali) | 24 | kali | 24 | kali | 24 | kali | 100 |
| | 02:03:02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Kali) | 12 | kali | 12 | kali | 12 | kali | 100 |
| | 02:03:03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kali) | 24 | kali | 24 | kali | 24 | kali | 100 |
| | 02:03:04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Kali) | 12 | kali | 12 | kali | 12 | kali | 100 |
| | 02:03:05 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Kali) | 6 | kali | 6 | kali | 6 | kali | 100 |
| 02:04 Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 69 | | | | | |
| | 02:04:01 | Bimbingan Teknis DPRD | Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD (Orang) | 90 | orang | 52 | orang | 30 | orang | 100 |
| | 02:04:02 | Publikasi Dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Pelaksanaan Publikasi Dan Dokumentasi Dewan (Kali) | 48 | kali | 48 | kali | 48 | kali | 100 |
| | 02:04:03 | Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli (Orang) | 3 | orang | 3 | orang | 3 | orang | 100 |
| | 02:04:04 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 5 | orang | 5 | orang | 5 | orang | 100 |
| | 02:04:05 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Kali) | 6 | kali' | 6 | kali' | 6 | kali' | 100 |
| | 02:04:06 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja DPRD (Dokumen) | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100 |
| 02:05 Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | 40 | | | | | |
| | 02:05:01 | Kunjungan Kerja Dalam Daerah | Pembayaran Kunker Dalam Daerah (kali) | 24 | kali | 24 | kali | 24 | kali | 100 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | 02:05:02 | Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Pokok-pokok Pikiran (Pokir) | 400 | pokir | 900 | pokir | 700 | pokir | 0 |
| | | 02:05:03 | Pelaksanaan Reses | Jumlah Reses (kali) | 3 | kali | 3 | kali | 3 | kali | 100 |
| 02:06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 100 | | | | | | | |
| | | 02:06:01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik DPRD (Dokumen) | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100 |
| | | 02:06:02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD (Kali) | 2 | kali | 2 | kali | 2 | kali | 100 |
| 02:07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah | 100 | | | | | | | |
| | | 02:07:01 | Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Jumlah Fasilitasi, Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah (Kali) | 4 | kali | 0 | kali | 0 | kali | 0 |
| 02:08 | Fasilitasi Tugas DPRD | | Persentase Fasilitasi Tugas DPRD | 100 | | | | | | | |
| | | 02:08:01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Pelaksanaan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Kali) | 6 | kali | 6 | kali | 5 | kali | 100 |
| | | 02:08:02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD (Dokumen) | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | |

Capaian Kinerja Output Tahun 2021 terdiri dari 2 program 18 Kegiatan dan 60 sub kegiatan tahun 2020 terdiri dari 7 program 39 kegiatan, Capaian kinerja output tahun 2021 dan 2020 dapat dituangkan pada tabel dibawah ini :



Capaian kegiatan tahun 2021 dari 2 (dua) Program dan 18 (delapan belas) kegiatan, dan 60 (enam puluh) sub kegiatan antara lain:

1. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indikator sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar adalah jumlah dokumen laporan realisasi. Capaian kinerja tahun 2021 sebanyak 3 dokumen dari target 3 dokumen, capaian kinerja tahun 2020 realisasi sebanyak 3 dokumen hal ini sama dengan tahun 2021 hal ini perlu dipertahankan.

2. Administrasi keuangan perangkat daerah

Indikator sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah jumlah dokumen perencanaan. Capaian kinerja tahun 2021 sebanyak 9 dokumen dari target 9 dokumen, capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 9 dokumen hal ini sama dengan tahun 2021 hal ini perlu dipertahankan.

3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Capaian kinerja tahun 2021 sebanyak 1 tahun dari target 1 tahun, capaian kinerja tahun 2020 realisasi sebanyak 1 tahun hal ini sama dengan tahun 2021 hal ini perlu dipertahankan.

4. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Indikator sub kegiatan administrasi pelaksanaan tugas ASN adalah pembayaran jasa administrasi tugas ASN. Capaian kinerja tahun 2021 sebanyak 12 bulan dari target 12 bulan, capaian kinerja tahun 2020 realisasi sebanyak 12 bulan hal ini sama dengan tahun 2021 hal ini perlu dipertahankan.

5. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Indikator sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD adalah pembayaran jasa administrasi keuangan. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 12 bulan dari target 12 bulan, capaian kinerja tahun 2020 realisasi sebanyak 12 bulan hal ini sama dengan tahun 2021 hal ini perlu dipertahankan.

6. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD



Indikator sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah jumlah dokumen laporan akuntansi. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 16 dokumen dari target 16 dokumen, capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 16 dokumen hal ini sama dengan tahun 2021 hal ini perlu dipertahankan.

7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Indikator sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah jumlah dokumen laporan keuangan. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 1 dokumen dari target 1 dokumen, capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 1 dokumen hal ini sama dengan tahun 2021 hal ini perlu dipertahankan.

8. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Indikator sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya adalah jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 141 stel dari target 141 stel, capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 65 stel hal ini tidak sama dengan tahun 2021 karena pada tahun 2020 terjadi pengurangan anggaran pakaian dinas.

9. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Indikator sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi adalah jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 29 orang dari target 31 orang hal ini disebabkan karena tahun 2021 ada 2 orang yang tidak mengikuti Bimtek. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya 27 orang.

10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Indikator sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah jumlah komponen listrik dan penerangan kantor. Capaian kinerja pada tahun 2021 sebanyak 28 jenis dari target 28 jenis, capaian kinerja tahun 2020 realisasinya 28 jenis realisasinya sama dengan tahun 2021 hal ini perlu dipertahankan.

11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor. Capaian kinerja pada tahun



2021 realisasinya sebanyak 1 tahun dari target 1 tahun, capaian kinerja tahun 2020 realisasinya 1 tahun hal ini sama dengan tahun 2021 perlu dipertahankan.

12. Penyediaan peralatan rumah tangga

Indikator sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga adalah pengadaan peralatan rumah tangga. Capaian kinerja pada tahun 2021 realisasinya sebanyak 8 jenis dari target 8 jenis. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 4 jenis.

13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah jumlah jenis barang cetakan. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 9 jenis dari target 9 jenis. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 5 jenis.

14. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Indikator sub kegiatan penyediaan bahan bacaan adalah pembayaran tagihan surat kabar. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 12 bulan dari target 12 bulan hal ini perlu dipertahankan. capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 12 bulan.

15. Fasilitasi kunjungan tamu

Indikator sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu adalah penyediaan makan minum tamu. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 12 bulan dari target 12 bulan hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 12 bulan.

16. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 12 bulan dari target 12 bulan hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 12 bulan.

17. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Indikator sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan adalah jumlah pengadaan kendaraan dinas. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 4 unit dari target 4 unit hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 2 unit.

18. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya



Indikator sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 12 bulan dari target 12 bulan hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 12 bulan.

19. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 12 bulan dari target 12 bulan hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 12 bulan.

20. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Indikator sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah pembayaran gaji PHTT. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 11 bulan dari target 11 bulan hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 11 bulan.

21. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Indikator sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan adalah jumlah kendaraan Dinas/ Oprasional yang Terpelihara. Capaian kinerja tahun 2021 Realisasi 28 Unit dari target 28 unit hal ini perlu di pertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 25 Unit.

22. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 5 jenis dari target 5 Jenis hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 4 Jenis.

23. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan

Indikator Sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan adalah jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara .Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya 7 gedung dari terget sebanyak 7 gedung hal ini perlu di pertahan kan . capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 6 gedung .



24. Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 4 gedung dari target sebanyak 4 gedung hal ini perlu di pertahankan . Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 4 gedung.
25. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
Indikator sub kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD adalah pembayaran gaji DPRD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinyan sebanyak 14 bulan dari target sebanyak 14 bulan hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 14 bulan.
26. Pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD
Indikator sub kegaitan pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD dalah jumlah pakaiandinas dan atribut DPRD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 120 stel dari target sebanyak 120 stel hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 43 stel.
27. Pelaksanaan medical check up DPRD
Indikator sub kegiatan Pelaksanaan medical check up DPRD adalah jumlah medical check up DPRD. Capain kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 0 dari target 1 kali dikarena di tahun 2021 tidak ada penganggaran untuk sub kegiatan medical check up DPRD. Capaian kinerja tahun 2021 sebanyak 0.
28. Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD
Indikator sub kegiatan Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD adalah jumlah administrasi keanggotaan DPRD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 12 bulan dari target sebanyak 12 bulan hal ini perli dipertahankan . Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 12 bulan.
29. Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
Indikator sub kegiatan Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD adalah pembayaran rapat koordinasi dan konsultasi DPRD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 40 kali dari target sebanyak 40 kali hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 40 kali.



30. Penyediaan kebutuhan rumah tangga
Indikator sub kegiatan Penyediaan kebutuhan rumah tangga adalah jumlah kebutuhan rumah tangga. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 12 kali dari target sebanyak 12 kali hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 12 kali.
31. Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah
Indikator sub kegiatan penyusunan dan pembahasan pembentukan peraturan daerah adalah jumlah usulan rancangan peraturan daerah. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 1 dari target sebanyak 1 dokumen. Capaian kinerja tahun 2020 sebanyak 0.
32. Pembahasan rancangan peraturan daerah
Indikator sub kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah adalah jumlah rancangan peraturan daerah inisiatif dewan. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 4 dari target 4 raperda. capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 6 ranperda. Ranperda ini merupakan usulan dari OPD terkait.
33. Penyelenggaraan kajian perundang – undangan
Indikator sub kegiatan Penyelenggaraan kajian perundang – undangan adalah pdlaksanaan peraturan perundang – undangan. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 2 rancangan dari target sebanyak 2 rancangan. Capaian kinerja tahun 2020 sebanyak 0 rancangan.
34. Fasilitas penyusunan penjelasan/keterangan dan / atau naskah akademik
Indikator sub kegiatan Fasilitas penyusunan penjelasan/keterangan dan / atau naskah akademik adalah jumlah naskah akademik. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 0 dokumen.
35. Pembahasan KUA dan PPAS
Indikator sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS adalah jumlah pelaksanaan pembahasan KUA dan PPAS. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen hal ini perlu di pertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 1 dokumen.



36. Pembahasan perubahan KUA dan PPAS

Indikator sub kegiatan pembahasan perubahan KUA dan PPAS adalah jumlah pelaksanaan pembahasan perubahan KUA dan PPAS. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen hal ini perlu di pertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 1 dokumen.

37. Pembahasan APBD

Indikator sub kegiatan pembahasan APBD adalah jumlah pelaksanaan pembahsan. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 2 dokumen dari target sebanyak 2 dokumen hal ini perlu di pertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 2 dokumen.

38. Pembahasan APBD perubahan

Indikator sub kegiatan Pembahasan APBD perubahan adalah jumlah pelaksanaan pembahasan perubahan APBD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 1 dokumen.

39. Pembahasan pertanggung jawaban APBD

Indikator sub kegiatan Pembahasan pertanggung jawaban APBD adalah jumlah pelaksanaan pertanggung jawaban APBD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 2 dokumen dari target sebanyak 2 dokumen hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 2 dokumen.

40. Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum

Indikator sub kegiatan Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum adalah jumlah pelaksanaan pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 24 kali dari target sebanyak 24 kali hal ini perlu di pertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 24 kali.

41. Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur



Indikator sub kegiatan Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur adalah jumlah pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 12 kali dari target sebanyak 12 kali hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 12 kali.

42. Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat

Indikator sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat adalah jumlah pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 24 kali dari target sebanyak 24 kali hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 sebanyak 24 kali.

43. Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian

Indikator sub kegiatan Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian adalah jumlah pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 12 kali dari target sebanyak 12 kali hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 sebanyak 12 kali.

44. Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan

Indikator sub kegiatan Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan adalah jumlah pelaksanaan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan kuangan. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 6 kali dari target sebanyak 6 kali hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 6 kali.

45. Bimbingan teknis DPRD

Indikator sub kegiatan Bimbingan teknis DPRD adalah jumlah pelaksanaan bimbingan teknis DPRD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 52 orang dari target 90 orang hal ini disebabkan tahun 2021 tidak semua fraksi melaksanakan bimbingan teknis DPRD. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 30 orang.

46. Publikasi dan dokumentasi Dewan



Indikator sub kegiatan Publikasi dan dokumentasi Dewan adalah jumlah pelaksanaan publikasi dan dokumentasi Dewan. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 48 kali dari target 48 kali hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 48 kali.

47. Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli

Indikator sub kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli adalah jumlah pelaksanaan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 3 orang dari target sebanyak 3 orang hal ini perlu dipertahankan . Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 3 orang.

48. Penyediaan tenaga ahli fraksi

Indikator sub kegiatan Penyediaan tenaga ahli fraksi adalah jumlah pelaksanaan penyediaan tenaga ahli fraksi. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 5 orang dari target sebanyak 5 orang hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 5 orang.

49. Penyelenggaraan hubungan masyarakat

Indikator sub kegiatan Penyelenggaraan hubungan masyarakat adalah jumlah penyelenggaraan hubungan masyarakat. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 6 kali dari target sebanyak 6 kali hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 6 kali.

50. Penyusunan program kerja DPRD

Indikator sub kegiatan Penyusunan program kerja DPRD adalah jumlah pelaksanaan penyusunan program kerja DPRD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 1 dokumen.

51. Kunjungan kerja dalam daerah

Indikator sub kegiatan Kunjungan kerja dalam daerah adalah Pembayaran kungker dalam daerah. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 24 kali dari target sebanyak 24 kali hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 24 kali.

52. Penyusunan pokok – pokok pikiran DPRD

Indikator sub kegiatan Penyusunan pokok – pokok pikiran DPRD adalah jumlah pokok – pokok pikiran. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 900



pokir dari target sebanyak 400 pokir. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 700 kali.

53. Pelaksanaan reses

Indikator sub kegiatan Pelaksanaan reses adalah jumlah reses. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 3 kali dari target sebanyak 3 kali hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 3 kali.

54. Penyusunan kode etik DPRD

Indikator sub kegiatan Penyusunan kode etik DPRD adalah jumlah pelaksanaan penyusunan kode etik DPRD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 kali hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 1 dokumen.

55. Pengawasan kode etik DPRD

Indikator sub kegiatan Pengawasan kode etik DPRD adalah jumlah pelaksanaan pengawasan kode etik DPRD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 2 kali dari target sebanyak 2 kali hal ini harus dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 2 kali.

56. Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah

Indikator sub kegiatan Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah adalah jumlah fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 0 kali dari target sebanyak 4 kali dikarenakan padatnya kegiatan anggota DPRD tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 0 kali.

57. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD adalah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya sebanyak 6 kali dari target sebanyak 6 kali hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 5 kali.

58. Penyusunan laporan kinerja DPRD

Indikator sub kegiatan Penyusunan laporan kinerja DPRD adalah pelaksanaan penyusunan laporan kinerja DPRD. Capaian kinerja tahun 2021 realisasinya



sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen hal ini perlu dipertahankan. Capaian kinerja tahun 2020 realisasinya sebanyak 1 dokumen.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Secara umum penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

1. Alokasi dana anggaran 2021 belum seluruhnya dapat digunakan pada kegiatan tersebut.
2. Kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal.
3. Adanya faktor eksternal yang tidak diperhitungkan sebelumnya.
4. Terlambatnya pencairan dana sedangkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang terbatas.
5. Tingkat profesionalisme sebagai aparatur pelaksana kegiatan yang masih kurang.
6. Pelaksanaan kegiatan yang belum terkoordinasi dengan baik.
7. Pergeseran/pengurangan anggaran dikarenakan covid 19 sehingga ada kegiatan yang outputnya tidak mencapai target kegiatan.

Melihat pencapaian kinerja DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur diatas mewujudkan kinerja sbb :

1. Profesional Kinerja dan Meningkatkan SDM yang berkualitas.
2. Disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dari setiap Sub Bagian.
3. Pemerataan anggaran kinerja pada tiap bagian sehingga semua aparat dapat bekerja bersama-sama untuk mempercepat tujuan yang di harapkan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2021, Sekretaris DPRD menetapkan 2 Sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut ini akan disajikan capaian kinerja organisasi setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja :



Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|----|--|--|--------|-----------|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Kesekretariatan Dewan | Persentase fasilitasi penyusunan Perda | 90% | 100% |
| | | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 78,00 | 78,65 |
| 2 | Peningkatan pelayanan public, akuntabilitas kinerja dan keuangan | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) | 72,00 | 76,54 |
| | | Laporan keuangan sesuai (SAP) | sesuai | sesuai |

Sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, berdasarkan analisis indeks kepuasan, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur persentase fasilitasi penyusunan Perda tahun 2021 dari target 90% dengan realisasi 100%, Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) target 78,00 dengan realisasi 78,65 Nilai Akuntabilitas kinerja (AKIP) target 72,00 dengan realisasi 76,54 Laporan keuangan sesuai (SAP) target sesuai dengan realisasi sesuai.

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2021

| Tahun 2020 | | | | Tahun 2021 | | | |
|--|--|--------|-----------|--|--|--------|-----------|
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| Meningkat kualitas layanan kesekretariatan Dewan | Indeks kepuasan dewan terhadap kesekretariatan | 78,00 | 78,65 | Peningkatan peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan | Persentase fasilitasi penyusunan Perda | 90% | 100% |
| | Indeks kepuasan OPD terhadap kesekretariatan | 78,00 | 78,65 | Peningkatan pelayanan public, akuntabilitas kinerja dan keuangan | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 78,00 | 78,65 |



| | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|--|------------------------------------|--------|--------|
| | Indeks kepuasan masyarakat terhadap kesekretariatan | 78,00 | 78,65 | | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) | 72,00 | 76,54 |
| | | | | | Laporan Keuangan Sesuai SAP | Sesuai | Sesuai |

Berdasarkan table 3.5 bahwa perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 berbeda dikarenakan tahun 2020 menggunakan RPJMD dan Renstra 2016-2021 sedangkan untuk tahun 2021 menggunakan RPJM dan Renstra 2021-2026.

Capaian kinerja tahun 2021 sesuai dengan target jangka menengah (RENSTRA) Sekretariat DPRD.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Renstra | Realisasi 2021 | Tingkat Kemajuan |
|----|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 1 | Peningkatan peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan | Persentase fasilitasi penyusunan Perda | 90% | 100% | 111,11% |
| 2 | Peningkatan pelayanan public, akuntabilitas kinerja dan keuangan | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 78,00 | 78,65 | 100,83% |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) | 72,00 | 76,54 | 106,31% |
| | | Laporan Keuangan Sesuai (SAP) | sesuai | sesuai | sesuai |

Secara umum Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Pencapaian Kinerja Tahun



Anggaran 2021 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja 2021.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap Peraturan Daerah Inisiatif dan Eksekutif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021, untuk tahun 2021 Perda Inisiatif tidak ada yang ditetapkan sedangkan untuk Perda eksekutif ada 4 (empat) Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur, yang tertuang pada table dibawah ini :

Tabel. 3.8
Peraturan Daerah Eksekutif DPRD
Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

| No | Peraturan Daerah | | Tentang | Tanggal Penetapan | Pemrakarsa |
|----|------------------|-------|---|-------------------|--------------------------------------|
| | Nomor | Tahun | | | |
| 1 | 01 | 2021 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 20 Agustus 2021 | Badan Keuangan Daerah |
| 2 | 02 | 2021 | RPJMD Tahun 2021-2026 | 26 Oktober 2021 | BAPPEDA |
| 3 | 03 | 2021 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 Desember 2021 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| 6 | 04 | 2021 | APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 | 29 Desember 2021 | Badan Keuangan Daerah |



Tingkat pencapain instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing–masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

C. REALISASI ANGGARAN

Secara finansial, dana rutin yang tersedia maupun untuk membiayai kegiatan sehari-hari, pembayaran gaji, tunjangan, insentif dan lain-lain. Begitu pula dana pembangunan yang cukup memadai untuk melaksanakan program/kegiatan Bagian.

Untuk penyerapan dan realisasi anggaran tahun 2021 dari pagu dana sebesar **Rp.37.606.118.018,00,-** telah terealisasi sebesar **Rp.32.847.026.622,00-** atau sekitar **(87,34%)**, dan dana yang tidak terserap sekitar **Rp.4.759.091.396,00-**.



Pengukuran, evaluasi dan analisis pencapain sasaran strategik untuk tahun 2021 dilakukan terhadap1 (satu) sasaran yang meliputi 2 Program yang didukung 18 kegiatan dan 60 sub kegiatan.



Secara umum realisasi anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran 2021

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| SEKRETARIAT DPRD | | 37.606.118.018 | 32.846.846.622 | 87,34 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 30.395.975.560 | 28.497.969.226 | 93,76 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 98.109.682 | 96.630.750 | 98,49 |
| | 1 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 50.217.122 | 48.900.850 | 97,38 |
| | 2 Evaluasi kinerja perangkat daerah | 47.892.560 | 47.729.900 | 99,66 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.498.831.491 | 3.394.124.352 | 97,01 |
| | 3 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 3.017.378.550 | 2.922.415.252 | 96,85 |
| | 4 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 52.353.000 | 46.219.300 | 88,28 |
| | 5 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 410.978.573 | 408.163.200 | 99,31 |
| | 6 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | 6.798.000 | 6.572.600 | 96,68 |
| | 7 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 11.323.368 | 10.754.000 | 94,97 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 195.099.000 | 192.771.743 | 98,81 |
| | 8 Pengamanan barang milik daerah SKPD | 195.099.000 | 192.771.743 | 98,81 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 360.143.000 | 328.788.600 | 91,29 |
| | 9 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 127.083.000 | 123.062.000 | 96,84 |

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

| | | | | | |
|---|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 10 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 233.060.000 | 205.726.600 | 88,27 |
| 5 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4.161.492.353 | 3.096.029.120 | 74,40 |
| | 11 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 192.602.420 | 192.602.420 | 100,00 |
| | 12 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 661.484.883 | 586.760.485 | 88,70 |
| | 13 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 456.733.500 | 435.015.740 | 95,24 |
| | 14 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 372.171.550 | 370.023.700 | 99,42 |
| | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan | 757.300.000 | 736.293.500 | 97,23 |
| | 16 | Fasilitasi kunjungan tamu | 1.659.474.000 | 714.238.275 | 43,04 |
| | 17 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 61.726.000 | 61.095.000 | 98,98 |
| 6 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 531.335.582 | 522.628.000 | 98,36 |
| | 18 | Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 101.146.000 | 99.250.000 | 98,13 |
| | 19 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 430.189.582 | 423.378.000 | 98,42 |
| 7 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.081.190.000 | 1.791.023.150 | 86,06 |
| | 20 | Penyediaan jasa surat menyurat | 26.700.000 | 25.108.000 | 94,04 |
| | 21 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 494.400.000 | 329.315.150 | 66,61 |
| | 22 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 1.560.090.000 | 1.436.600.000 | 92,08 |
| 8 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.216.576.078 | 2.194.789.186 | 99,02 |

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

| | | | | | |
|-----------|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 23 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan | 629.980.000 | 618.710.920 | 98,21 |
| | 24 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 188.748.078 | 188.702.566 | 99,98 |
| | 25 | Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan | 1.309.448.000 | 1.302.010.200 | 99,43 |
| | 26 | Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 88.400.000 | 85.365.500 | 96,57 |
| 9 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 14.470.126.374 | 14.233.208.827 | 98,36 |
| | 27 | Penyelenggaraan administrasi keuangan | 14.246.646.374 | 14.019.783.827 | 98,41 |
| | 28 | Penyediaan pakaian dinas atribut DPRD | 222.150.000 | 212.175.000 | 95,51 |
| | 29 | Pelaksanaan medical check up DPRD | 1.330.000 | 1.250.000 | 93,98 |
| 10 | | Layanan Administrasi DPRD | 2.783.072.000 | 2.647.975.498 | 95,15 |
| | 30 | Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD | 1.998.000 | 1.997.950 | 100,00 |
| | 31 | Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD | 2.181.074.000 | 2.045.977.548 | 93,81 |
| | 32 | Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD | 600.000.000 | 600.000.000 | 100,00 |
| 2 | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 7.210.142.458 | 4.348.877.396 | 60,32 |
| 11 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 1.292.133.013 | 690.356.714 | 53,43 |
| | 33 | Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah | 400.607.889 | 283.250.350 | 70,71 |
| | 34 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | 725.679.992 | 365.214.600 | 50,33 |
| | 35 | Penyelenggaraan kajian perundang undangan | 88.569.810 | 36.183.464 | 40,85 |

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

| | | | | | |
|----|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 36 | Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik | 77.275.322 | 5.708.300 | 7,39 |
| 12 | | Pembahasan kebijakan anggaran | 410.717.797 | 232.204.500 | 56,54 |
| | 37 | Pembahasan KUA dan PPAS | 49.004.970 | 29.052.800 | 59,29 |
| | 38 | Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS | 49.005.000 | | 0,00 |
| | 39 | Pembahasan APBD | 81.881.140 | 81.231.400 | 99,21 |
| | 40 | Pembahasan APBD perubahan | 81.881.128 | | 0,00 |
| | 41 | Pembahasan pertanggung jawaban | 148.945.559 | 121.920.300 | 81,86 |
| 13 | | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | 780.225.000 | 212.420.000 | 27,23 |
| | 42 | Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintah dan hukum | 206.490.000 | 42.935.000 | 20,79 |
| | 43 | Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintah bidang infrastruktur | 126.510.000 | 57.835.000 | 45,72 |
| | 44 | Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | 229.500.000 | 76.650.000 | 33,40 |
| | 45 | Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian | 125.925.000 | 32.270.000 | 25,63 |
| | 46 | Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan lap. Keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan | 91.800.000 | 2.730.000 | 2,97 |
| 14 | | Peningkatan kapasitas DPRD | 2.102.965.571 | 1.309.445.882 | 62,27 |
| | 47 | Bimbingan teknis DPRD | 1.133.570.000 | 461.308.900 | 40,70 |
| | 48 | Publikasi dan dokumentasi dewan | 735.086.207 | 686.851.982 | 93,44 |
| | 49 | Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli | 50.000.000 | | 0,00 |
| | 50 | Penyediaan tenaga ahli fraksi | 150.000.000 | 150.000.000 | 100,00 |
| | 51 | Penyelenggaraan hubungan masyarakat | 22.795.000 | | 0,00 |
| | 52 | Penyusunan program kerja DPRD | 11.514.364 | 11.285.000 | 98,01 |
| 15 | | Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat | 1.002.261.725 | 588.868.400 | 58,75 |



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| | | | | | |
|----|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 53 | Kunjungan kerja dalam daerah | 107.035.000 | 12.705.000 | 11,87 |
| | 54 | Penyusunan pokok - pokok pikiran DPRD | 18.880.380 | 18.450.000 | 97,72 |
| | 55 | Pelaksanaan reses | 876.346.345 | 557.713.400 | 63,64 |
| 16 | | Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD | 7.885.077 | 4.761.700 | 60,39 |
| | 56 | Penyusunan kode etik DPRD | 5.005.077 | 4.761.700 | 95,14 |
| | 57 | Pengawasan kode etik DPRD | 2.880.000 | | 0,00 |
| 17 | | Pembahasan kerjasama | 20.374.000 | - | 0,00 |
| | 58 | Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah | 20.374.000 | - | 0,00 |
| 18 | | Fasilitasi tugas DPRD | 1.593.580.275 | 1.310.820.200 | 82,26 |
| | 59 | Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD | 1.586.070.000 | 1.303.799.200 | 82,20 |
| | 60 | Penyusunan laporan kinerja DPRD | 7.510.275 | 7.021.000 | 93,49 |

Realisasi capaian keuangan sebesar 87,34% ini berarti bahwa ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karena berdasarkan rincian pelaksanaan program dan kegiatan ditemukan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, dimana terdapat 1 (satu) kegiatan yang serapanya 0



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan rencana strategis serta sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada komponen kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 2 program pencapaiannya 87,34%.

Realisasi pencapaian dalam tahun 2021 ini merupakan hasil yang ditampilkan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yang perlu diusahakan solusinya dengan berbagai upaya pemecahan yang signifikan.

4.2 SARAN

Untuk menindaklanjuti berbagai realisasi capaian dalam tahun 2021 dan dalam upaya untuk segera mungkin dapat mengeliminasi permasalahan yang dihadapi, maka disarankan agar :

- Perlu adanya perencanaan, analisis dan strategi agar kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing bidang benar-benar mempunyai manfaat/benefit yang besar yang didasarkan pada kebutuhan dan mengedepankan skala prioritas untuk menghindari pernyataan-pernyataan oleh stakeholders.
- Program-program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar merupakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang prioritas.
- Dalam membuat suatu perencanaan anggaran hendaknya melibatkan komponen aparatur dan saran dari unsure eksternal dengan tetap mengacu kepada aturan-aturan yang menjadi pedoman.
- Dalam membuat suatu perencanaan kegiatan seyogyanya mempertimbangkan sumber daya yang ada baik manusia, dana dan potensi yang ada.



- Perlu adanya sinkronisasi anggaran dengan situasi saat pandemic covid 19.
- Perlunya suatu standar baku/pedoman dalam penyusun LKjIP sehingga LKjIP benar-benar bisa dijadikan tanggungjawab kinerja bersama yang tidak memberikan persepsi/pemahaman yang berbeda dari setiap aparatur pemerintah.

Demikian Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 ini disusun sebagai bagian pertanggungjawaban kinerja pemerintah dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Muara Sabak, Januari 2022



SYAFARUDDIN, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671015 198810 1 001